

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikumto, Suharsimi, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Azed, Abdul Bari, 2001, *Percikan Pemikiran Tentang Hukum dan Demokrasi*, Pusat Kajian Hukum Tata Negara FHUI, Jakarta.
- Baswir, Revrisond, 1999, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, BPFE, Yogyakarta.
- Cholis, Nur, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Djojosoekarto, Agung, 2004, *Dinamika Dan Kapasitas DPRD Dalam Tata Pemerintahan Demokratis*, Konrad Adeneur Stiftung, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad, 2007, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Doli D. Siregar, 2004. *Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's Pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dunsire, A. 1978, *Control in a Bureaucracy*, New York.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Efendi Paulus, Lotullung, 1993, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gie, The Liang, 1993, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., dkk, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Handayani, Soewarno, 1996, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta

- Hasyimzoem, Yusnani, dkk., 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- Ilmar, Aminuddin, 2016, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Islamy, Irfan, 1986, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Jimung, Martin, 2005, *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Yayasan Pustaka Nusanara, Yogyakarta.
- Kelsen, Hans, 2015, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Krina P., Loina Lalolo, 2003, *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, & Partisipasi*, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Lubis, Marzuki, 2011, *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-Undangan tentang DPRD & Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.
- Lotullung, Paulus Efendi, 1993, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1994, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Manan, Bagir, 1983, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, NISKA, Kerawang.
- \_\_\_\_\_, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*, Erlangga, Jakarta.

- Marbun dan Mahfun, M.D., 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Murhaini, Suriansyah, 2008, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Naning, Ramdlon, 1982, *Aneka Asas Ilmu Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Porter, Thomas, 1992, *EDP Pengendalian dan Auditing*. Erlangga, Jakarta.
- Ridlwan, Zulkarnain, 2011, *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Soleh, Chabib, dan Heru Romansjah, 2010, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Fokus Media, Bandung.
- Soehino, 2002, *Perkembangan Pemerintah di Daerah*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudjana S., 2004, *Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Falah Production, Bandung.
- Sujamto, 1987, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sunarno, Siswanto, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, BPFE, Yogyakarta.

Usaid, LGSP, 2007, *Membina Hubungan dengan Konstituen*, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widya, Elli. 2011. *Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Pertama*. BPFE. Yogyakarta.

Yusuf, M., 2013, *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.

### **Hasil Penelitian, Tesis, Jurnal, Makalah, Kamus, dan Artikel Lainnya**

Arif Wibowo, 2015, Fungsi Kepala Daerah Kabupaten Sanggau dalam melakukan Pengawasan di Bidang Pendidikan di Kabupaten Sanggau (Sekolah Menengah Atas), *Tesis*: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Tidak dipublikasikan, Yogyakarta.

Budiyono, 2013, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No. 1, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Djauhari, 2015, “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi Kolusi Nepotisme”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 2, PDIH UNISSULA, Semarang.

Draf Laporan Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara Pembahasan Tentang Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017, (Diperoleh melalui wawancara dengan Staf Pansus DPRD Provinsi Sumatera Utara).

Hasan, Alwi, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kusen, Gaby Jelly, 2015, “Prinsip-Prinsip Hukum Pengelolaan Aset Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara)”, *Lex et Societatis*, Vol III No. 2, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara, Surat Perihal: Pembentukan Pansus Aset DPRD Provinsi Sumatera Utara Kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Medan 12 Februari 2015.

- Maskun, Sumitro, 1996, *Ceramah Dirjend PUOD tentang Strategi Pembiayaan Pengembangan Otonomi Daerah Peluang dan Tantangannya*, Seminar Nasional Strategi Pembiayaan Pengembangan Otonomi Daerah, DEP DAGRI.
- Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, 2008, Etika Kepemimpinan Aparatur, Jakarta, LAN RI.
- Morse, J.M., 1991, Subjects, Respondents, Informants, and Participants? *Qualitative Health Research*, 1(4).
- Nurhidayati, Siti, 2017, Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Neraca Daerah di Kabupaten Bantul, *Tesis: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Tidak dipublikasikan, Yogyakarta.
- Pazri, Muhammad, Implementasi Prinsip Good Governance dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia, *Badamai Law Journal*, Vol. 1, Issues 2, September 2016.
- Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara, Surat Pimpinan Dewan Nomor 614/18/Sekr Perihal: Menghunjuk Anggota Fraksi sebagai Anggota Panitia Khusus, Medan 12 Maret 2015.
- Risalah Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan II Tahun Sidang I 2014-2015, DPRD Provinsi Sumatera Utara, Medan 24 Maret 2015.
- Sonata, Depri Liber, 2014, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Suryana, Muhammad Rizki, 2010, “Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Penggunaan Dana Perimbangan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Tesis, Magister Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta.
- Zufkifli, Untung Afandi, Sri Handaru Yulianti, M. Khoiru Rusydi, Yansor Djaya, Winnston Potoh, Dyah Purwanti, Irwan Hercules Sitorus, Eny Santriani, Asep Agus Hemanto, “*Modul Pengelolaan Barang Milik Daerah*”, Kursus Keuangan Daerah (KKD) 2013.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.

Pearturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Presiden Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4/K/2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 3.

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8/KP/2007 tentang Penetapan Personil Panitia Khusus Provinsi Sumatera Utara Tentang Aset Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10/K/2009 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Penertiban Aset Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 14/K/2015 tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara Pembahasan tentang Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

### Internet

Ali Mashduqi, *Sistem Pengawasan Melekat, Pengawasan Fungsional, dan Pengawasan Politis*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, (<http://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/21143-sistem-pengawasan-melekat,-pengawasan-fungsional-dan-pengawasan-politis>, diakses pada Tanggal 31 Juli 2018).

Analisadaily (Medan) - Yayasan Komunitas Cerdas Adil Berkelanjutan (ADAB) bekerja sama dengan Pansus Aset DPRD Sumatera Utara menggelar seminar partisipasi publik mengangkat tema ‘Optimalisasi Pengelolaan Aset Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara’ di Aula Gedung DPRD Sumatera Utara, Selasa, 23 November 2016, “*Masyarakat Dukung DPRD Sumut Kawal Pendataan Aset Pemprov*”, (<http://news.analisadaily.com/read/masyarakat-dukung-dprd-sumut-kawal-pendataan-aset-pemprov/277123/2016/11/23>, diakses pada Tanggal 11 Januari 2018).

Benardo Sinambela, “*Fakta Tentang Aset-Aset Pemprov*”, (<http://www.benardosinambela.id/2016/11/fakta-tentang-aset-aset-pemprov.html?m=0>, diakses pada Tanggal 11 Januari 2018).

BPK, “Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2015”, [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id), diakses pada Tanggal 1 Juni 2018.

Hindri Asmoko (2006). “Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian”. Melalui (<http://www.bppk.depkeu.go.id>)

Irwan Arfa – Juraidi, “*Pemrov Sumut Kembali Raih Opini WTP*”, (<https://sumut.antaranews.com/berita/166605/pemprov-sumut-kembali-raih-opini-wtp>, diakses pada Tanggal 11 Januari 2018).

LKPD Provinsi Sumatera Utara, ([http://medan.bpk.go.id/?page\\_id=18463](http://medan.bpk.go.id/?page_id=18463), diakses pada Tanggal 11 Januari 2018).

User (Admin), “*Kunjungan Kerja Pansus Aset DPRD-SU Dengan Pemerintah Kab/Kota*”, (<https://www.dprd-sumutprov.go.id/index.php/blog/2015/10/kunjungan-kerja-pansus-aset-dprdsu-dengan-pemerintah-kabkota>, diakses pada Tanggal 11 Januari 2018).

## **Wawancara**

Brilian Moktar, Ketua Panitia Khusus Aset dan Anggota Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, (Hasil Wawancara pada Tanggal 19 Februari 2018 di Medan).

Dwi Endah Purwanti, Kepala Bagian Pengadaan dan Perawatan, Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Utara, (Hasil wawancara pada Tanggal 14 Februari 2018 di Medan mu).

H.M. Hanafiah Harahap, S.H., Wakil Ketua Panitia Khusus Aset dan Anggota Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara, (Hasil wawancara pada Tanggal 5 Februari 2018 di Medan).

Suryadi, Kepala Bidang Aset, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, (Hasil Wawancara pada Tanggal 14 Februari 2018 di Medan).

Yulizar Parlagutan Lubis, Anggota Panitia Khusus Aset dan Anggota Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara, (Hasil Wawancara pada Tanggal 20 Desember 2017 di Medan).